

**PERAN SULTAN ABDUL HAMID DALAM MENJALANKAN
POLITIK DAGANG BEBAS DI KESULTANAN BIMA
TAHUN 1773-1817**

Asmawati

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas PGRI Yogyakarta

E-mail: asma96978@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah politik dagang bebas pada masa Sultan Abdul Hamid, serta dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat Bima. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka, dengan beberapa tahap diantaranya; a) pemilihan judul, b) heuristik, c) kritik sumber, d) interpretasi, dan e) historiografi. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: 1) Sultan Abdul Hamid merupakan Sultan Bima yang ke-9, beliau lahir sekitar tahun 1761 dan wafat pada 1 Ramadan 24 Juni 1819. 2) Upaya yang dilakukan Sultan Abdul Hamid dalam menjalankan kembali politik dagang bebas di Bima yaitu: a) Sultan berbaik-baik dengan Belanda, b) keuntungan karena pembubaran VOC akibat korupsi yang merajalela, c) Belanda kalah terhadap Inggris yang otomatis Bima berada dibawah kekuasaan Inggris, d) sikap Sultan dan Ruma Bicara tidak loyal terhadap isi perjanjian dengan Belanda. 3) Dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah lepas dari monopoli dagang Belanda tidaklah begitu lama, dikarenakan musibah meletusnya Gunung Tambora 1815.

Kata kunci : Politik Dagang Bebas, Sosial Masyarakat, Sultan Abdul Hamid

Abstract

This study aims to determine the history of free trade politics at the time of Sultan Abdul Hamid, as well as its impact on the socio-economic community of Bima. The method used is literature review, with several stages including; a) title selection, b) heuristics, c) source criticism, d) interpretation, and e) historiography. The results showed as follows: 1) Sultan Abdul Hamid was the 9th Sultan of Bima, he was born around 1761 and died on 1 Ramadan 24 June 1819. 2) The efforts made by Sultan Abdul Hamid in carrying out free trade politics in Bima were: : a) The Sultan was on good terms with the Netherlands, b) the advantage of the dissolution of the VOC due to rampant corruption, c) the Dutch lost to the British which automatically Bima was under British rule, d) the attitude of the Sultan and Ruma Bicara were disloyal to the contents of the agreement with the Dutch. 3) The impact felt by the community after being released from the Dutch trade monopoly was not that long, due to the eruption of Mount Tambora in 1815.

Keywords: *Sultan Abdul Hamid, Free Trade Politics, Social Society, Sultan Abdul Hamid*

PENDAHULUAN

Kabupaten Bima merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Nusa Tenggara Barat (NTB). Di sebelah barat merupakan Kabupaten Dompu sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Flores, dan di sebelah selatannya adalah Samudera Indonesia. Apabila ditinjau dari segi geografis, Bima memiliki potensi yang besar untuk menjadi daerah yang lebih maju terutama dalam sektor perdagangan. Hal ini karena letaknya yang strategis, yakni di tengah kepulauan Nusantara. Selain itu, didukung pula oleh hasil alamnya yang melimpah seperti kayu soga (kayu untuk pemberi warna), rotan, damar, kuda, kerbau, dan lain-lain (Kartini Mawaddah, 2017: 140).

Secara administrasi wilayah Kota Bima terdiri dari 6 kecamatan, dan 38 kelurahan, Kota Bima berdasarkan data tahun 2017 tercatat sebesar 116.295 jiwa yang terdiri dari 57.108 jiwa (49%) penduduk laki-laki dan 59.187 jiwa (51%) penduduk perempuan. Sebaran penduduk kurang merata, konsentrasi penduduk berada di pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Penduduk terbanyak berada di Kelurahan Paruga, yaitu berjumlah 12.275 jiwa (11%) dan paling sedikit di Desa Kendo yang berjumlah 1.130 jiwa (1%). Selanjutnya berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kota Bima berjumlah 142.443 jiwa yang terdiri dari 69.8411 jiwa laki-laki dan 72.602 jiwa perempuan (Badan Pusat Statistik Kota Bima,

<https://bimakota.bps.go.id/> diakses pada 24 September 2020).

Secara historis Kesultanan Bima merupakan salah satu wilayah yang memiliki peranan penting dalam panggung sejarah Islam khususnya di kawasan Nusa Tenggara. Jauh sebelum terjadinya proses pengislaman, Bima sudah menjadi daerah dengan perkembangan perdangan yang cukup pesat. Menurut catatan Bo Sangaji Kai, cikal bakal daerah Bima dirintis oleh pendarang dari Jawa yang bernama Sang Bima yang kemudian menikah dengan Putri Tasi Sari Naga. Dari pernikahan tersebut melahirkan dua orang putra yang bernama Indra Zamrud dan Indra Komala, kedua anaknya tersebutlah yang menjadi cikal bakal keturunan raja-raja Bima (Abdullah Tajib, 1999: 11).

Dalam catatan lainnya disebutkan bahwa Ncuhi Dara dan Padolo menyampaikan keputusan pada saat Sang Bima memahat Wadu Pa'a mungkin dilakukan oleh Sang Bima yang beragama Hindu Siwaistik atau orang-orang Hindu yang hilir mudik melewati Flores kala itu. Kuat dugaan dia sedang memimpin ekspedisi yang singgah di Pulau Satonda kemudian tiba di teluk Bima. Bisa dikatakan bahwa sang Bima merupakan orang yang memiliki andil penting dalam pendirian kerajaan Bima Hindu namun raja pertama yang memimpin kerajaan Bima yakni putranya Indra Zamrud yang diasuh oleh Ncuhi Dara. Agama resmi kerajaan, ajaran Islam sudah masuk dan menyebar ke wilayah-wilayah pesisir pantai Bima (Abdul Gani Abdullah, 2009).

Kesultanan Bima sampai akhir masa kesultanan telah diperintah oleh 14 orang sultan dengan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai sultan terakhir. Pada masa sultan kedelapan, Abdul Kadim, tepatnya tanggal 9 Februari 1765 M Belanda memaksanya untuk menandatangani Kontrak Monopoli Dagang, sehingga Bima harus tunduk kepada politik monopoli dagang Belanda dan meninggalkan politik dagang bebasnya yang sudah dijalankan jauh sebelum Islam masuk. Sejak itu Bima tidak boleh berhubungan dengan bangsa lain dan hasil bumi harus dijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditetapkan. Hal ini sangat merugikan perkembangan ekonomi Bima selanjutnya (M. Hilir Ismail, 2008: 115-116).

Adanya kegoncangan politik yang terjadi di lingkungan kesultanan pada masa Sultan Abdul Kadim telah mengundang campur tangan Belanda dan sangat merugikan Bima, sehingga menyebabkan Bima terjerat dalam sistem monopoli. Ketika dalam kondisi seperti ini, Sultan Abdul Kadim wafat pada tahun 1773 M dan kekuasaan dilimpahkan kepada anaknya, Abdul Hamid. (M. Hilir Ismail, 2004). Pada saat Abdul Hamid naik tahta, Bima sudah satu abad di bawah kekuasaan Kompeni. Kontrol Belanda di bidang politik dan ekonomi berakibat Kerajaan Bima bukan lagi pusat perniagaan antarpulau di kawasan Indonesia Timur, sehingga kehilangan berbagai sumber kemakmuran (Henri Chambert-Loir, 2010).

Pada awal masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid, kondisi dan situasi politik ekonomi Bima kurang mengembirakan. Timbulnya masalah tersebut disebabkan oleh dua faktor penting yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yang menyulitkan posisi Bima pada masa Sultan Abdul Hamid adalah adanya kontrak dengan Belanda yang ditandatangani oleh Sultan Abdul Kadim pada tahun 1765. Kontrak tersebut pada hakekatnya mengikat Bima untuk menerima monopoli Belanda. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi Sultan Abdul Hamid yang berusia muda, dan yang belum memiliki pengalaman. Berhasil tidaknya Bima menangani masalah ekonomi dan sosial politik pada masa itu tergantung sungguh dari kemampuan Ruma Bicara Muhyiddin sebagai wali sultan (M. Hilir Ismail, 2008: 117).

Faktor luar yang ikut mempengaruhi situasi ekonomi dan sosial politik pada saat itu adalah tindakan Belanda yang selalu memaksakan kehendaknya kepada sultan dan raja-raja Indonesia untuk menerima hegemoni Belanda dalam perdagangan. Para sultan dan raja selalu dibujuk atau dipaksa untuk mengakui monopoli dagang Belanda melalui kontrak dagang. Hal ini amat menguntungkan Belanda dan amat merugikan para sultan dan raja-raja Indonesia. (M. Hilir Ismail, 2008: 119). Perubahan ekonomi Bima akibat penguasaan penuh oleh Kompeni sangat dirasakan oleh masyarakat Bima.

Imperialisme Belanda menyebabkan berkurangnya pendapatan rakyat. Para pedagang Belanda yang berniaga di Bima mengatur sendiri harga barang dan kapal-kapal Bima yang berniaga ke berbagai pelabuhan yang dikuasai Kompeni diawasi secara ketat serta dikenai bea cukai yang tinggi. Ketika Abdul Hamid berkuasa, kapal-kapal Bima dipermudah dalam pelayarannya oleh Kompeni (Kartini Mawaddah, 2017: 150).

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini ingin mengkaji sekaligus menemukan dua aspek. Pertama, penelitian ini ingin menemukan peran Sultan Abdul Hamid dalam menjalankan politik dagang bebasnya Tahun 1773-1817 dalam melawan kebijakan Belanda. Kedua, penelitian ini ingin menemukan dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat Bima terhadap adanya politik dagang bebas. Dengan hal tersebut hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai basis pengembangan penelitian sosial, ekonomi sekaligus kebudayaan khususnya yang memiliki fokus pada politik dagang bebas Sultan Abdul Hamid Tahun 1773-1817.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (literature) dengan pendekatan biografi guna melihat Sultan Abdul Hamid secara individual, sehingga mudah untuk mengungkapkan sejarah yang berkaitan dengan diri sultan. Pendekatan biografis ini bertujuan untuk memberikan pengertian tentang subyek, dan berusaha menetapkan dan

menjelaskan dengan teliti kenyataan-kenyataan hidupnya, pengaruh-pengaruh yang diterima subyek itu dalam masa formatif kehidupannya, sifat dan watak subyek, serta nilai subyek itu terhadap perkembangan suatu aspek kehidupan (Tarsito, 1990). Selain pendekatan biografis, juga digunakan pendekatan sosial-politik menurut Duverger (Duverger, 2005) bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam semua masyarakat manusia, bukan saja di dalam masyarakat nasional. Pendekatan ini digunakan untuk memahami peristiwa-peristiwa sosial dan politik di Bima sebelum dan saat pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Prosedur penelitian ini dimulai dengan memfokuskan pada pengkajian terhadap Kebijakan Politik Dagang bebas yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid.

Dalam proses pencaharian sumber, dilakukan beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut, pertama yaitu heuristik dimana peneliti mencari sumber-sumber sejarah, baik sumber primer berupa buku Bo' Sang Aji dan sumber skunder berupa buku-buku tentang sejarah Bima serta tulisan jurnal, artikel, maupun internet yang membahas tentang sejarah Bima. Pencaharian sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan Universitas PGRI Yogyakarta, Internet, serta hasil penelitian-penelitian yang terdahulu baik berupa buku-buku, jurnal penelitian dan skripsi. Tahap selanjutnya yaitu kritik sumber, yaitu pada tahap ini diuji keabsahan dan keaslian sumber (otentik)

yang dilakukan melalui kritik intern dan eksteren. Tahap ini penulis melakukan pengujian terhadap isi sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dengan memilah informasi yang sesuai dengan judul yang di ambil oleh penulis, yaitu informasi mengenai Peran Sultan Abdul Hamid dalam Menjalankan Politik Dagang Bebas Di Kesultanan Bima pada Tahun 1773- 1817 M. Data yang diperoleh lalu dibandingkan dengan data lainnya guna menemukan keabsahan sumber dan mengambil data yang bisa dipercaya untuk dikritisi setelah melakukan kritik maka data disebut fakta.

Langkah ketiga adalah penafsiran atau intepretasi. Intepretasi atau sering disebut analisis mempunyai pengertian menguraikan dan secara terminologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Kerangka metode ini, peneliti akan memberikan intepretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh mengenai Peran Sultan Abdul Hamid dalam Menjalankan Politik Dagang Bebas Di Kesultanan Bima pada Tahun 1773-1817 M. Tahap yang terakhir yaitu historiografi, Pada tahap ini penelitian sejarah (metode sejarah) adalah menyajikan hasil pengolahan data yang dikumpulkan dalam sebuah tulisan ilmiah. Hal ini, penulis berusaha menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa lainnya sehingga menjadi sebuah rangkaian yang berarti dan disajikan secara sistematis, dipaparkan dalam beberapa bab yang saling melengkapi agar mudah dipahami oleh penulis, pembaca maupun pendengar.

Dengan menggunakan kajian literatur dan pengumpulan dokumen-dokumen khususnya yang berhubungan dengan Sultan Abdul Hamiid dan kebijakan politik dagang bebas yang dilakukan pada Tahun 1773- 1817 M. Hasil dari kajian penelitian akan dianalisis menggunakan teori peranan sosial karena Abdul Hamid yang mempunyai kedudukan tinggi di Bima tentu akan mempunyai peran penting di Bima serta disegani dan dihormati oleh masyarakat. Teori peranan sosial ini dikembangkan oleh Erving Goffman, yang didefinisikan dalam pengertian pola-pola atau norma-norma yang diharapkan dari orang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam struktur sosial (Peter Burke, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan letak geografisnya, Haris (1997: 6) dalam Tawalinuddin Haris (2006: 18) Wilayah Kerajaan Bima berada di bagian timur Pulau Sumbawa, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur dengan Selat Sape, di sebelah selatan dengan Lautan Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Dompu. Secara lebih terperinci, Van Hollander (1908: 75) menggambarkan batas antara Bima dan Dompo dengan sebuah garis pada 118° 37' di pantai utara ke arah selatan melalui Gunung Wawo-Sahe ke arah 118° 38' 30' di pantai selatan. Luas Kerajaan Bima sebagaimana tercantum dalam penjelasan kontrak antara Gubernur Celebes en Onderhoorigheden dan Sultan Bima pada tahun 1886 seluruhnya adalah 156 mil

persegi dengan perincian di Pulau Sumbawa ditambah dengan pulau-pulau kecil seluas 71,5 mil persegi dan di Pulau Flores seluas 84,5 mil persegi (Morris 1890: 176-177).

Adanya kegoncangan politik yang terjadi di lingkungan kesultanan pada masa Sultan Abdul Kadim telah mengundang campur tangan Belanda dan hal ini sangat merugikan Bima, sehingga menyebabkan Bima terjatuh dalam sistem monopoli. Ketika dalam kondisi seperti ini, Sultan Abdul Kadim wafat pada tahun 1773 M dan kekuasaan dilimpahkan kepada anaknya, Abdul Hamid. Pada saat Abdul Hamid naik tahta, Bima sudah satu abad di bawah kekuasaan Kompeni. Kontrol Belanda di bidang politik dan ekonomi berakibat Kerajaan Bima bukan lagi pusat perniagaan antar pulau di kawasan Indonesia Timur, sehingga kehilangan berbagai sumber kemakmuran (Mawaddah, 2017).

Berbagai penelitian tentang Kesultanan Bima telah banyak dikaji oleh para ilmuwan dan akademisi. Sebagian dari mereka menitik beratkan pada peranan setiap Sultan yang menjabat pada masanya. Penelitian (Reni Saputri, 2016) tentang Kesultanan Bima di Bawah Pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin Tahun 1917-1942 didapatkan kesimpulan bahwa pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin banyak sekali cobaan dan gangguan dari Belanda, Aspek politik Sultan Muhammad Salahuddin adalah melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda dengan cara perang

yang terjadi antara Belanda dan Sultan. Adapun usaha Sultan Muhammad Salahuddin memajukan Bima tahun 1917-1942, melalui beberapa aspek yaitu aspek pendidikan adalah memberikan ilmu pengetahuan kepada rakyat Bima terutama untuk kaum pemuda, agar menjadi orang yang berguna bagi Bangsa dan Negara untuk kedepannya.

Sedangkan dalam kajian (Saidin Hamzah, 2016) tentang Peranan Sultan Muhammad Salahuddin Dalam Perkembangan Islam Di Bima, dalam mengembangkan Islam di Bima Sultan melakukan pembaharuan sehingga pada masanya Islam di Bima mengalami kejayaan. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Sultan adalah membangun lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, dan masjid-masjid. dalam menunjang kemajuan daerah Bima Sultan membiayai dan memberikan beasiswa kepada remaja yang sekolah di timur tengah dan bagi mereka yang memiliki kemampuan dalam bidang agama.

Sedangkan dalam kajian Studi Kartini Mawaddah tentang Diplomati Sultan Abdul Hamid di Kerajaan Bima Tahun 1773- 1817 M, dalam penelitiannya (Yogyakarta, 2017) diperoleh kesimpulan bahwa dalam Bidang politik Sultan Abdul Hamid memanfaatkan hubungan baiknya dengan Kompeni sebagai jalan untuk memperoleh kepentingan Kesultanan Bima. Siasat politiknya ini dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan alat persenjataan dan keamanan perdagangan. Selain itu, ia juga mempertegas keberadaan Hukum Hadat dan Hukum

Islam, menciptakan lambang kesultanan berbentuk garuda berkepala dua sebagai simbol kedaulatan Bima, serta mengodifikasi hukum-hukum tersebut agar seluruh masyarakat Bima memperhatikan dan menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dari uraian penelitian-penelitian diatas yang membedakan penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini sebagai berikut. Pertama dari segi fokus masalah. Penelitian ini lebih memfokuskan pada peran Sultan Abdul Hamid dalam menjalankan politik dagang bebas di Kesultanan Bima Tahun 1773- 1817 M, yang belum begitu banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada beberapa sultan yang berbeda dan lebih mengkaji kondisi kesultanan pada masa pemerintahan setiap sultan. Kedua, sisi sosial yang mana belum banyak yang meneliti dampak politik dagang bebas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Bima Tahun 1773- 1817 M. Ketiga, dari segi teoritik belum banyak peneliti yang berusaha memadukan antara sejarah politik dagang bebas Sultan Abdul Hamid dengan pendekatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan demikian, kajian dalam penelitian ini adalah pada politik dagang bebas yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid pada Tahun 1773-1817 M.

1. Latar Belakang Kehidupan Sultan Abdul Hamid

Sultan Abdul Hamid lahir sekitar tahun 1761: dalam sebuah surat oleh fetor

Bima Lecerff bertanggal 5 Oktober 1773 (lih. Noorduyn 1987a: 56), disebut bahwa beliau berumur sekitar 12 tahun (jadi lahir tahun 1761); sedangkan dalam sebuah surat perjanjian antara Bima dan Kompeni tanggal 19 November 1774 (tersimpan di ANRI), disebut bahwa beliau berumur 11 tahun, jadi lahir tahun 1763, hal ini berbeda dengan pendapat Vermeulen (1805: 5) menyatakan beliau berumur 40 tahun (jadi lahir tahun 1761). Dari berbagai pendapat diatas disimpulkan masih belum didapat tanggal pasti kapan Sultan Abdul Hamid dilahirkan.

Sultan Abdul Hamid mewarisi tahta Kerajaan Bima dari almarhum ayahnya, Sultan Abdul Kadim Muhammad Syah (1751-1773). Pada waktu itu Bima sebenarnya sudah berada dalam pengaruh VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*, Perusahaan Dagang Hindia Timur), yang sejak beberapa dekade sebelumnya sudah berusaha memasuki pulau Sumbawa. Pada 9 Februari 1765 Sultan Abdul Kadim bersama lima raja lainnya dari Pulau Sumbawa menandatangani kontrak perjanjian dengan petinggi VOC di Makassar, *Cornelis Sinkelar*, mewakili atasannya di Batavia, *Petrus Albertus Van der Parra* (menjabat 1761-1775). Sukses itu dicapai VOC setelah beberapa kali berupaya masuk ke Bima untuk menanamkan pengaruhnya di Pulau Sumbawa. Sebelumnya, pada tanggal 8 Desember 1669 VOC yang diwakili *Admiral Speelman* menandatangani kontrak perjanjian dengan sultan Bima Abdul Khair Sirajuddin

(1640-1682) akibat Bima ikut membantu kerajaan Gowa melawan VOC.

Sultan Abdul Hamid wafat pada 1 Ramadan 24 Juni 1819 (Cahmbert-Loir 2004: 258,328; Ismail 2004: 117) “ pada malam Selasa, pukul tujuh waktu Isya” dalam usia 57 tahun, usia yang sebenarnya belum begitu tua. Namun sumber lain mengatakan bahwa beliau meninggal dunia pada 14 Juli 1817 (*Contract van 25 febr. 1822 en miss [ive] van Kruitkoff*). Di dalam SKB (bait 83-217) diceritakan suasana duka yang dalam yang menyelimuti kedua anaknya (Ismail dan Siti Jamila Bumi Kaka), para gundiknya, petinggi Kerajaan dan rakyat Bima pada umumnya akibat ditinggal mati oleh raja yang mereka cintai itu (Cahmbert-Loir 2004: 275). Bima berada dalam suasana berkabung selama 40 hari dan tak satu pun bunyi-bunyian boleh ditabuh.

2. Politik Dagang Bebas Di Bima

Adanya campur tangan Kompeni dalam perekonomian di Bima tentu saja dapat mengganggu sistem ekonomi yang sudah lama diterapkan oleh Kesultanan Bima. Sehingga pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid terlihat upaya yang dilakukan untuk menerapkan kembali politik dagang bebas yang menjadi sistem perekonomian Kesultanan Bima sebelum kedatangan Kompeni ke Sumbawa. Sebagaimana halnya kerajaan-kerajaan lokal lainnya di Nusantara pada awal ke-18 dan 19, keperluan kerajaan-kerajaan lokal seperti Bima mencari sandaran patron kepada Belanda yang sudah menguasai teknologi senjata perang adalah untuk menjaga kedaulatannya yang sering

dirongrong oleh bajak laut atau diserang oleh kerajaan-kerajaan tetangganya (Sjamsuddin 2006: 926). Sehingga Sultan disini berusaha membangun hubungan yang baik dengan Kompeni, dengan motif dan tujuan untuk mendapatkan pasokan senjata dari Belanda.

Dalam surat-surat yang lain dapat dilihat bahwa Sultan Abdul Hamid berbaik-baik dengan Belanda juga dimaksudkan untuk menjaga kepentingan perdagangan lautnya. Sultan meminta kepada Kompeni untuk memberi keleluasaan (mungkin berarti pembebasan atau keringanan bea masuk dan cukai) kepada kapal-kapalnya yang memasuki pelabuhan-pelabuhan penting yang dikuasai Kompeni, seperti Batavia, Semarang dan Makassar. Perlakuan yang sama juga akan diterima oleh kapal-kapal Kompeni yang masuk ke Bandar Bima.

Adanya beberapa keuntungan yang dialami pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid untuk menerapkan kembali politik dagang bebas yang sempat tertunda akibat monopoli yang dilakukan Belanda yang sudah ada dari pemerintahan Sultan sebelumnya. Pada masa awal Kesultanan Abdul Hamid, Kompeni Belanda mengalami kesulitan dalam masalah keuangan. Biaya yang dikeluarkan dalam menghadapi perjuangan bangsa Indonesia cukup merepotkan Belanda. Kekalutan ekonomi Belanda semakin memuncak, karena dikalangan pegawai kompeni merajalela korupsi. Para pegawai VOC selalu memperkaya diri, akibatnya VOC mengalami kerugian, sehingga oleh

orang Belanda sendiri VOC dijuluki “kumpulan orang-orang korupsi” (Hilir Ismail, 2004: 111).

Selain itu adanya ancaman dari Inggris ditambah pula oleh sikap Sultan Abdul Hamid bersama Ruma Bicara Abdul Nabi yang tidak loyal terhadap isi kontrak tahun 1792, Gubernur Belanda yaitu *Gubernur Willem Beeth* pada tahun 1810 mengundang sultan bersama Ruma Bicara untuk datang ke Makassar dalam rangka membuat dan menandatangani kontrak baru. Namun kontrak baru itupun tidak dapat menolong, karena pada tanggal 15 September 1811 Belanda menyerah kepada Inggris. Dengan demikian Bima bukan lagi menjadi jajahan Belanda yang otomatis perdagangan bebas bisa dilakukan kembali (Hilir Ismail, 2004: 120).

Pada masa pemerintahan Letnan Jendral Thomas Stamford Raffles (1811-1816), Bima kembali menjalankan politik dagang bebas. Hubungan dengan Inggris berjalan baik. Raffles dan Sultan Abdul Hamid selalu bertukar informasi melalui surat menyurat. Surat-surat mereka dibawa dan diantar oleh para pedagang Nusantara yang datang ke Bima. Ketika Sultan Abdul Hamid bersama Ruma Bicara Abdul Nabi mulai menghirup udara baru yang segar bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial politik Bima, diluar pengetahuan manusia, pada tanggal 11 April 1815 terjadi bencana yang sangat amat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda manusia. Pada saat itu Gunung Tambora meletus dengan dahsyatnya (Hilir Ismail, 2001: 123).

3. Dampak Politik Dagang Bebas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Bima Tahun Tahun 1773-1817

Dampak perdagangan ini sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan Bima baik sebagai kota Bandar maupun kota pusat pemerintahan karena perniagaan dapat memacu pertumbuhan Negara (kerajaan) atau kota-kota daerah pantai. Dalam perdagangan penguasa akan mendapatkan income dari pajak (pajak pelabuhan dan pajak perdagangan) dan sebagian dari income tersebut dipergunakan untuk membangun kota maupun kerajaan (Negara) dalam arti yang seluas-luasnya (Tawalinuddin Haris, Susanto Zuhdi, Triana Wulandari, 1997: 51).

Secara sosial ekonomi, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, sejak abda ke-16 oleh Raja yang memerintah pada masa itu telah dibuka lahan pertanian baru secara luas, yang diperuntukkan bagi sawah adat dan tanah pertanian bagi rakyat umum. Oleh karena itu, mata pencaharian pokok orang Bima sejak dahulu adalah pertanian. Mereka menanam padi, kacang, jagung, kemiri, dan bawang dalam jumlah yang besar. Padi dan jagung ditanam untuk keperluan sendiri dan tidak dikirim keluar, tetapi ditukar dengan bahan-bahan keperluan lain, seperti bahan sandang, dan ikan. Yang dikirim keluar daerah adalah kacang, kemiri, dan terutama bawang yang merupakan hasil pertanian potensial. Selain itu ditanam juga ubi, ketela, labu, kacang-kacangan untuk kebutuhan pangan sendiri, kemudian kelapa untuk menjadikan minyak dan kopra, dan tebu

untuk diolah menjadi gula (Depdikbud, 1992: 79).

Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid, setelah lepas dari monopoli dagang Belanda. Kini masyarakat Bima ditimpa masalah kembali yaitu pada tanggal 11 April 1815 Gunung Tambora meletus dengan dahsyat. Baik dalam Bo' Sangaji Kai maupun syair dari penyair terkenal Khatib Lukman melukiskan secara lengkap mengenai penderitaan dan kerugian yang dialami oleh Kesultanan Bima dan kesultanan lain yang ada di Pulau Sumbawa. Manusia banyak yang mati, bahkan dua kerajaan yang letaknya berdekatan Gunung Tambora, menjadi hancur dan lenyap, yaitu: Kerajaan Pekat dan Kerajaan Tambora.

KESIMPULAN

Bima merupakan daerah kecil yang berada di ujung timur Pulau Sumbawa, dengan keberagaman bahasa, tradisi dan kebudayaan yang masih terjaga hingga saat ini. Perkembangan perjalanan sejarah suatu bangsa, ikut dipengaruhi oleh keadaan geografis yang dialami oleh bangsa tersebut. Sultan Abdul Hamid merupakan sultan yang paling lama menjabat dengan masa jabatan 44 tahun. Jauh sebelum masa pemerintahan beliau Belanda sudah masuk dan melakukan intervensi terhadap kerajaan Bima. Selain monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Kompeni, Dalam berbagai perjanjian antara Bima dan Kompeni, sebuah pasal lain, disamping pemasokan kayu sebang, adalah janji untuk saling membantu kalau salah satu pihak terlibat perang. Adanya

monopoli yang dilakukan Belanda, menimbulkan keinginan dalam diri sultan untuk mengembalikan sistem dagang bebas yang pernah diterapkan oleh kepemimpinan sultan terdahulu. Dengan adanya beberapa faktor pendorong seperti keruntuhan VOC, kedatangan Inggris, serta kekalahan Belanda melawan Inggris pada tahun 1811 di Bima. Secara perlahan politik dagang bebas kembali diberlakukan di Kesultanan Bima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah. 2009. *Bima Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Kota Bima, <https://bimakota.bps.go.id/> diakses pada 24 September 2020.
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1992. *Bandar Bima*.
- Henri Chamber Loir, dkk. 2010. *“Iman dan diplomasi serpihan sejarah kerajaan Bima”*. Kepustakaan Popular Gramedia: Jakarta.
- Hilir Ismail. 2001. *“Maja Labo Dahu sebagai Falsafah Hidup dalam Konteks Masa Kini”*: Makalah dalam Seminar Nasional Sehari dan Pergelaran Kesenian, Bima.
- _____. 2008 *Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950*. Bogor: CV Binasti.
- Kartini Mawaddah. 2017. *Diplomatik Sultan Abdul Hamid di Kerajaan Bima Tahun 1773- 1817 M. JUSPI*, Vol I, No. 1, hal. 139-153.
- Reni Saputri. 2016. *Kesultanan Bima Di Bawah Pemerintahan Sultan*

- Muhammad Salahuddin Tahun 1917-1942. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 4, No. 3, hal. 630-641.
- Rivaldi Apriyanto. 2018. Reaksi Sultan Muhammad Sirajuddin Terhadap Kontrak Politik Kolonial Tahun 1886-1945. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, Vol 3, No. 6, hal. 762-768.
- Saidin Hamzah. 2016. Peranan Sultan Muhammad Salahuddin Dalam Perkembangan Islam Di Bima. *Jurnal Rihlah*, Vol. IV Np. 1/2016, hal. 154-158.
- Tajib, Abdullah. 1999. *Sejarah Dana Mbojo*. Jakarta: Harapan Massa.
- Tawalinuddin Haris. 2006. Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa. *WACANA*, VOL 8, NO. 1, hal 17-17.